
**VERRIDE PARADE: ISU-ISUPARIWISATA BERKELANJUTAN PADA
DESTINASI KEPULAUAN DI INDONESIA****Putu Diah Sastri Pitanatri**Politeknik Pariwisata Bali, Bali, Indonesia, *Email: diahsastri@gmail.com*

ABSTRAK**Histori Artikel****Submitted:**

1 September 2019

Reviewed:

14 September 2019

Accepted:

1 Oktober 2019

Published:

15 November 2019

Pariwisata saat ini memiliki masalah; relatif kecanduan pertumbuhan, yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan. Meskipun selama lebih dari tiga decade pariwisata berkelanjutan terus didengungkan sebagai bentuk ideal dari pariwisata; otoritas pariwisata di seluruh dunia tetap mempromosikan aspek-aspek pertumbuhan meskipun keterbatasan ekologis dan social telah menjadi isu strategis di banyak negara. Selain itu yang menjadi permasalahan kemudian, pariwisata seringkali dikaitkan dengan berbagai isu yang relative memiliki spectrum yang jauh dari pariwisata itu sendiri. Dengan melakukan studi literatur dari 67 artikel baik dari prosiding, jurnal nasional dan internasional, buku, serta laporan dari lembaga nasional dan internasional, artikel ini melihat bagaimana sebenarnya esensi dasar dari permasalahan utama sector ini di Indonesia adalah *overtourism* dan *tourism leakage*. Karena itu tulisan ini berpendapat bahwa pariwisata harus dipahami dan dikelola dengan konteks keberlanjutan yang lebih luas. Rekomendasi dari tulisan ini diantaranya dibutuhkan riset-riset terbaru seperti *sustainable mobilities* melalui *big data* sehingga beragam pendekatan untuk strategi pariwisata dapat dilihat secara real time dan menyasar langsung pada permasalahan pariwisata.

Keywords: pariwisata berkelanjutan, *overtourism*, *tourism leakage*, *sustainable mobilities*, *big data*

**VERRIDE PARADE: SUSTAINABLE TOURISM ISSUES IN ISLANDS TOURISM
DESTINATION IN INDONESIA****ABSTRACT**

Tourism today has a problem. It is addicted to growth, which is incompatible with sustainability goals. Despite three decades discussing pathways to sustainable tourism, tourism authorities worldwide has continue to promote tourism growth despite the ecological and social limits of living on a finite planet. Looking to it's case to island destination in Indonesia overtourism and tourism leakage are two major problem the industry are facing. Therefore this article argues that tourism must be understood and managed with a wider context of sustainability. Additionally, strategic approaches to transitioning to a sufficiency approach to tourism and leisure is essential if sustainability is to be secured. Recommendations include Sustainable Mobilities, fostering diverse approaches to tourism strategies for development and regulating and managing tourism. An upgraded reseach in sustainable mobility through big data is reccomended to further diverse tourism strategies from approach that be analyzed in real time and directly targeted at tourism and destination problems.

Keywords: *sustainable tourism*, *overtourism*, *tourism leakage*, *sustainable mobilities*, *big data*



PENDAHULUAN

Sejak dijadikannya sebagai sektor unggulan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melalui program Nawa Citta menjadikan pariwisata sebagai salah satu *core economy*. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur. Keseriusan pemerintah ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan pariwisata unggulan.

Selain itu, didasarkan amanat RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata melalui dua jenis dukungan. Pertama, sebagai pelaku langsung ekonomi, yang mencakup penyediaan ruang terbuka publik/hijau, pengembangan gedung hijau, dan mendorong ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur. Kedua, sebagai pendukung pengembangan ekonomi, antara lain meliputi penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan ekonomi kreatif (air minum, sanitasi, jalan lingkungan), penerapan bantuan Gedung, dan Fasilitas Pemda melalui program Kota Hijau dan Kota Pusaka.

Pariwisata disebut mampu menghadirkan belanja wisatawan yang langsung diterima oleh masyarakat lokal sehingga diproyeksi dapat menjadi alat pemerataan ekonomi paling ampuh yang mampu menyentuh hingga ke level bawah masyarakat. Pariwisata juga diyakini sebagai komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level bawah masyarakat. Setiap tahun, performa pariwisata Indonesia menanjak di saat

beberapa komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot. Dalam angka, untuk tahun 2019 ini pariwisata diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik bruto sebesar 15%, Rp 280 triliun untuk devisa negara, 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan nusantara dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada tahun 2019 (Kompas, 2018; SindoNews, 2018). Lebih jauh, sektor pariwisata diyakini mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh negeri. Sebagai sektor “super”, pariwisata juga diharapkan mampu berperan sebagai “pil-ajaib” yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit kronis Negara ini.

"Diharapkan pula mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, juga kesenjangan dengan cepat dan tepat," Arief Yahya, Menteri Pariwisata (Republika, 2017)

Over-promise inilah yang kemudian menjadi titik awal permasalahan pengembangan kepariwisataan di Indonesia yang menjadi terlalu *addicted to growth*. Seringkali saat sebuah destinasi populer karena pariwisata, maka seluruh permasalahan akan ditujukan pada sektor ini. Mulai dari kemacetan, narkoba, seks bebas, isu lingkungan seperti sampah dan alih fungsi lahan sampai perubahan budaya menjadi “karena pariwisata”. Pertanyaannya kemudian, kemana sektor-sektor lainnya? Sebagai contoh, saat sebuah destinasi kesulitan air, maka yang bermasalah adalah pariwisata. Sedikit sekali yang melihat permasalahan ini sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perusahaan air mineral dalam kemasan dan *climate change* yang menyebabkan perubahan iklim global sehingga air menjadi sulit.

Memang tidak dapat dipungkiri pariwisata tentu memberi dampak baik positif maupun negative pada sebuah destinasi, namun sebagai peneliti pariwisata maka permasalahan seharusnya dilihat dari kacamata pariwisata. Selain itu, dalam studi-

studi sebelumnya cukup banyak literatur yang menekankan adanya *multiplier effect* dari pariwisata (Hughes, 1994; Adams dan Parmenter, 1995; Zhou et al, 1997; Dwyer et al, 2000; Blake dan Sinclair, 2003; Dwyer et al, 2006; Blake et al, 2008; Pratt dan Blake, 2009). Oleh sebab itu, artikel hanya ini akan membahas dua pokok permasalahan sebagai dampak langsung dari pertumbuhan pariwisata yang terlalu pesat di suatu destinasi sehingga berimplikasi terhadap keberlanjutannya, yaitu: *overtourism* dan *tourism leakage*. Untuk mempertajam bahasan, artikel ini hanya membatasi pada konteks destinasi kepulauan di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Pentingnya aspek keberlanjutan pada sector pariwisata telah menjadi prioritas organisasi dunia seperti United Nations, Bank Dunia, Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), World Travel & Tourism Council (WTTC) dan World Wide Fund for Nature. Menurut Saarinen (2006), istilah dan gagasan keberlanjutan dialihkan ke pariwisata dari ideologi pembangunan berkelanjutan setelah publikasi laporan Komisi Brundtland pada Stockholm Conference on Human and Environment "Our Common Future" pada tahun 1987, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: *sustainable development is defined as a process of meeting the present needs without compromising the ability of the future generations to meet their own needs* (WCED, 1987).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan (segala sesuatu yang kita nikmati) sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi, dengan pola pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak yang sama untuk menikmati alam beserta isinya ini.

Dalam laporan yang sama disebutkan juga konsep pembangunan berkelanjutan sebagai

suatu proses yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Dalam konsep ini, prinsip-prinsip keberlanjutan dirancang untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal sambil secara simultan melindungi dan meningkatkannya (Butler, 1999; Saarinen, 2006; Cawley dan Gillmor, 2007).

...the drive towards sustainable tourism has been prompted by concerns about the tourism environment relationship as well as interest in developing concepts that might help bring this relationship more in line with the ideology of "Our Common Future" (WCED, 1987).

Jika merujuk pada lingkup akademis; Bramwell dan Lane (1993) menyebutkan bahwa istilah pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) pertama kali ada dalam publikasi di tahun 1973 (oleh Dasmann et al., 1973) yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan politis di tahun 1980 dalam World Conservation Strategy (IUCN, 1980 dalam Mihalic 2016). Semenjak saat itu, pariwisata model ini digaungkan sebagai prinsip-prinsip pembangunan yang bertemakan keberlanjutan. Prinsip ini – yang kemudian dikenal dengan istilah *the three pillars* atau *the three elements of sustainability* merupakan prinsip yang diadopsi dari pembangunan berkelanjutan (UNEP & WTO, 2005). Ketiga prinsip itu ekonomi, lingkungan serta keberlanjutan sosial budaya kemudian menjadi konsep dasar penelitian-penelitian yang bertemakan pariwisata berkelanjutan.

Lebih lanjut, United Nation Environmental Programme (UNEP, 2009) menekankan perbedaan antara pertumbuhan pariwisata (*tourism growth*) dan pembangunan pariwisata (*tourism development*). Secara ringkas, penambahan jumlah pengunjung adalah indikator utama pertumbuhan pariwisata. Sementara pembangunan pariwisata ditandai dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja lokal serta manfaat lingkungan

yang disebabkan karena aktivitas pariwisata yang dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan pariwisata mengimplikasikan bahwa pembangunan pariwisata adalah pariwisata berkelanjutan, sementara pertumbuhan pariwisata belum tentu berkelanjutan.

UNWTO (2011) menekankan suatu kondisi ideal, yaitu bahwa semua pariwisata seharusnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Namun yang terjadi yaitu masih banyak negara, daerah dan entitas resmi yang belum memahami hal ini. Sebagai akibatnya, keuntungan yang sebesar-besarnya dikejar dengan cara mengorbankan

dan pada akhirnya merusak sumberdaya pariwisata. Dunia kemudian mengenal pariwisata dua kutub yaitu konvensional dan berkelanjutan.

Sesungguhnya terdapat perbedaan yang substansial antara pariwisata biasa atau konvensional dan pariwisata berkelanjutan. Inti pariwisata berkelanjutan yaitu bahwa kegiatan pariwisata secara lingkungan tidak merusak alam, secara budaya dan sosial tidak mengubah tatanan masyarakat, dan secara ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Dilihat dari beberapa indikator, berikut perbedaan antara pariwisata konvensional dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbedaan Pariwisata Konvensional dengan Pariwisata Berkelanjutan

Indikator	Pariwisata Konvensional	Pariwisata Berkelanjutan
1. Tujuan Utama	Profit sebagai satu-satunya tujuan utama	Direncanakan dengan tiga tujuan, yaitu keuntungan, lingkungan, dan masyarakat
2. Perencanaan (<i>planning</i>)	Seringkali tidak dirancang sebelumnya baik oleh penyedia jasa maupun pengunjung	Umumnya memiliki proses perencanaan yang baik, jauh hari sebelum destinasi itu dibuka untuk turis dan umumnya melibatkan berbagai pihak
3. Orientasi	Kepuasan pengunjung/wisatawan saja	Berorientasi kepentingan bersama, terfokus pada kepentingan lokal
4. Fungsi Kontrol	Dikontrol orang luar/investor yang mengutamakan profit	Dikontrol dan dikelola sebagian besar atau seluruhnya orang lokal atau "green investor" yang mengutamakan keuntungan bagi orang lokal
5. Fokus kunjungan	Fokus untuk menyenangkan wisatawan – yang seringkali menciptakan tourist bubble pada destinasi tersebut (misal membuka restoran khusus untuk wisatawan dari Negara A)	Fokus untuk memberi pengalaman kepada pengunjung (<i>creating experiences</i>) dimana wisatawan misalnya diajak untuk menikmati makanan lokal
6. Aspek Konservasi lingkungan	Konservasi bukan menjadi prioritas	Konservasi merupakan prioritas
7. Masyarakat lokal	Masyarakat lokal bukan prioritas pengembangan. Hal ini sering berujung pada tenaga kerja yang bukan dari masyarakat lokal karena pengalaman yang ingin diciptakan bukan <i>local expertise</i> dari destinasi tersebut	Masyarakat adalah prioritas karena merekalah yang berperan dalam penciptaan <i>experience</i> untuk wisatawan. Oleh sebab itu ada apresiasi akan budaya lokal.
8. Profit sharing	Lebih besar porsi keuntungan dinikmati orang luar sebagai investor dan operator	Porsi pendapatan terbesar mengalir ke masyarakat lokal

Dari berbagai sumber, konstruk penulis, 2019

Meskipun demikian, secara empiris dapat dilihat bahwa penekanan terhadap keberlanjutan ekonomis di industry

pariwisata mendapat prioritas tertinggi sementara aspek lingkungan merupakan prioritas terendah (Blackstock et al., 2008;

Bohdanowicz et al., 2005; Bramwell et al., 2008; Mihalic et al., 2012). Seolah-olah lebih mudah menerapkan agenda keberlanjutan bagi sector public dibandingkan swasta karena bagaimapun juga keuntungan perusahaan adalah *top notch priority* dibandingkan lainnya.

Berbeda halnya dengan turunan dari prinsip keberlanjutan seperti konsep *the triple bottom line* (TBL) atau corporate social responsibility (CSR) yang sejatinya lebih mendekati industry sehingga dapat diadaptasikan dan diaplikasikan secara langsung. Keengganan industry untuk berbicara keberlanjutan melahirkan istilah baru seperti *green tourism*, sebagai sinonim dari terminology ini. Dalam konsep modern diskusi dan debat terkait perbedaan *sustainable*, CSR, TBL atau *green tourism* menjadi kontra produktif karena sejatinya seluruh terminology ini merujuk pada ketiga pilar yang sama.

Yang menarik, berkembang juga konsep yang disebut sebagai pariwisata bertanggung jawab atau *responsible tourism* yang menjadi warna dari pariwisata berkelanjutan. Jika *sustainable tourism* lebih kepada konsep makro, maka *responsible tourism* lebih kepada aspek bisnisnya. Konsep ini telah ada sejak tahun 1980an, dengan kajian-kajian yang berfokus pada permasalahan lingkungan dalam lingkup pariwisata (Bramwell et al., 2008; Butler, 1995; Chettiparamb and Kokkranikal, 2012; Goodwin, 2011; Leslie, 2012b, 2012c).

Bertentangan dengan konsensus relatif pada makna tiga pilar pada pariwisata berkelanjutan, yang diamati sebagai sebuah konsep, gagasan pariwisata yang bertanggung jawab (atau *responsible tourism*) belum begitu kuat atau sering diterapkan. Menurut beberapa penulis, *responsibility* dan *responsible tourism* dapat berarti "apa saja" (Chettiparamb dan Kokkranikal, 2012, hlm. 302; van Marrewijk, 2003), dan penggunaannya tidak menambah pemahaman konseptual tentang pariwisata. Literatur dan studi yang ada tentang pariwisata yang bertanggung jawab

mengungkapkan banyak pemahaman yang bervariasi mengenai apakah subjeknya adalah konsep, teori atau praktik (Leslie, 2012a, b, c); apakah kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tujuan yang berbeda; ataukah model ini menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan atau menciptakan tempat yang lebih baik bagi masyarakat lokal untuk tinggal dan turis untuk berkunjung (RTP, 2002). Dalam kajian literature lebih lanjut, ditemukan pemahaman bahwa pariwisata model ini berfokus pada konsumsi dan proses produksi yang bertanggung jawab (Budeanu, 2005; Stanford, 2008; Bramwell et al., 2008; Hall, 2012, Kusworo, 2015). Penekanan ini berarti baik masyarakat lokal, turis, penyedia amenitas pariwisata serta pemerintah lokal memiliki relasi atau nexus yang kuat dalam mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, pariwisata yang bertanggung jawab bukan sinonim untuk pariwisata berkelanjutan. Pariwisata yang bertanggung jawab membahas wacana pariwisata berkelanjutan dalam implementasi dan lebih merupakan ungkapan untuk menggambarkan pariwisata yang berkelanjutan karena ia "bertindak" berkelanjutan. Ini bukan hal yang baru, bukan alternatif baru untuk bentuk pariwisata lain atau cara baru "melakukan" pariwisata berkelanjutan, seperti yang dinyatakan oleh beberapa penulis (Blackstock et al., 2008).

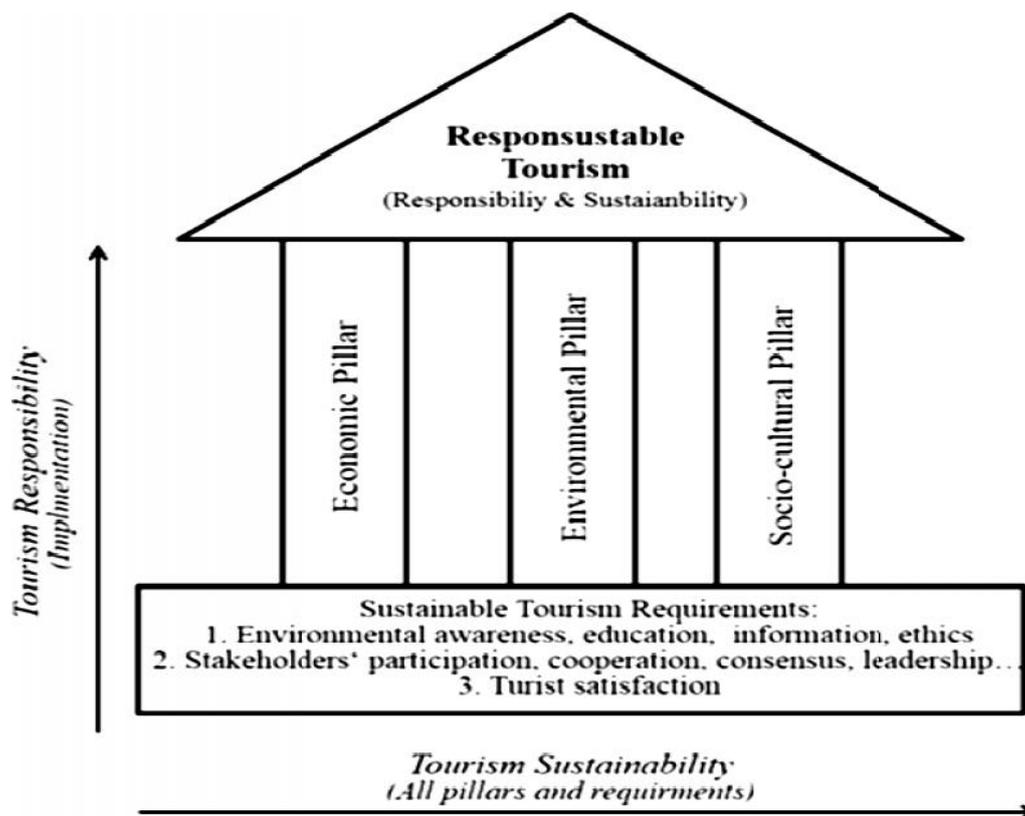
Dengan demikian, pariwisata yang bertanggung jawab dibangun di atas strategi dan kebijakan berbasis keberlanjutan yang tepat dan menambahkan perilaku yang sesuai, yang berarti tindakan yang berkelanjutan (kembali) atau, sesuai dengan konsep Goodwin, dimana kemampuan merespon, didukung oleh kesadaran dan etika dalam lingkungan pariwisata itu sendiri (Fennell, 2006). Lebih lanjut, Mihalic (2016) menyebutkan penggabungan antara pariwisata berkelanjutan dengan pariwisata yang bertanggung jawab kemudian melahirkan terminology yang disebut sebagai *responsutable tourism* sebagai model baru

yang dapat menjadi jembatan antara gap yang muncul dari *responsible* dengan *sustainable tourism*.

Merging the words responsible (behaviour-based) and sustainable (concept and values-based) produces the new term responsustainable tourism. It is argued that this new term fully reflects the academic and practical debate and action that is increasingly labelled

“responsible” tourism, yet de facto based on sustainability (Mihalic, 2016).

Koneksi antara pariwisata bertanggung jawab yang keberlanjutan ini diilustrasikan pada Gambar. 1 dibawah ini di mana pilar pembangunan berkelanjutan berdiri di atas persyaratan pariwisata berkelanjutan. Atap struktur disebut pariwisata *responsustainable (responsibility & sustainability)*, yang menunjukkan tanggung jawab dan keberlanjutan dalam perilaku pariwisata.



Gambar 1. Model *Responsustainable Tourism*
Sumber: Mihalic, (2016)

Tidak hanya konsep *responsustainable*; sampai saat ini begitu banyak publikasi yang menuliskan pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan. Ada yang menghubungkannya dengan United Nations Sustainable Development Goals (UN-SDG); ada juga yang melihatnya dalam aspek aplikatif sehingga menghasilkan berbagai model pariwisata baru seperti ecotourism, pilgrimage tourism, bahkan walking tourism. Di satu sisi, konsep keberlanjutan telah berfungsi untuk beberapa orang sebagai

magic wand yang mengarah ke model dan bentuk pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan dan sosial (Ritchie dan Crouch, 2000; Swarbrooke, 1999). Di sisi lain, konsep ini terus-menerus dikritik karena cacat dan tidak memadai (Higgins-Desbiolles, 2010). Dengan kata lain, diskusi keberlanjutan telah membantu menarik perhatian pada perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam pariwisata.

Penetrasi aktual pariwisata berkelanjutan ke dalam strategi dan kebijakan telah menghasilkan banyak implikasi baik seperti penghematan energi, daur ulang, pengurangan limbah dan emisi dan upaya untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk lokal. Namun, ada juga bukti signifikan dari efek sebaliknya. Wheeler berpendapat bahwa konsep pariwisata berkelanjutan yang “menarik secara intelektual” memiliki aplikasi praktis yang sangat rendah karena berada dalam tataran konsep dan perdebatan akademis tanpa solusi aplikatif— sehingga pada dasarnya memungkinkan perilaku yang sama seperti sebelumnya (Wheeler, 1993).

Memang, konsensus tentang keefektifan pengembangan pariwisata berkelanjutan tetap sulit dipahami (Chettiparamb dan Kokkranikal, 2012), dan implementasinya dalam praktiknya tetap sulit, sehingga sampai saat ini meninggalkan banyak industri pariwisata menjadi "... sangat tidak berkelanjutan" (Higgins-Desbiolles, 2010, hlm. 117)

METODE

Untuk mendapatkan gambaran komprehensif terhadap permasalahan yang ada, artikel ini mempergunakan metode deskriptif analitis dengan dukungan rujukan dari sumber berita online yang kredibel, analisa perkembangan pembangunan pariwisata dari Bapenas dan Kementerian Pariwisata yang diperkuat dengan pendalaman materi melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari *desk study*.

Studi literature mempergunakan 67 artikel baik dari prosiding, jurnal nasional dan internasional, buku, serta laporan dari BAPPENAS, Badan Pariwisata Internasional (UNWTO) dan World Economy Forum (WEF). Didalam melakukan resensi publikasi, tulisan ini dibantu dengan program Mendeley sehingga kajian literatur dapat dibuat dengan padat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Overtourism dan Destinasi Kepulauan

Fenomena *overtourism* saat ini diindikasikan telah terjadi di banyak destinasi dunia. Secara awam *overtourism* dimaknai sebagai angka turis yang sangat tinggi dan melebihi daya tampung ekosistem pariwisata di tempat itu, namun apa sebenarnya *overtourism* masih menjadi sebuah perdebatan sampai saat ini karena terminologi tersebut sangat mirip dengan apa yang telah lebih dulu dikenal oleh dunia akademisi sebagai *over carrying capacity*.

Jika merujuk kebelakang, istilah ini pertama kali muncul sebagai (*hashtag*) #overtourism di Twitter pada 2012. Istilah tersebut menjadi populer dan mengacu pada destinasi di mana turis, tuan rumah, dan warga lokalnya merasakan adanya terlalu banyak turis sehingga kualitas kehidupan di daerah itu dan pengalaman di destinasi itu telah menurun di luar batas yang bisa diterima.

Destinasi seperti Mallorca dan Barcelona di Spanyol, New Orleans di AS, Santorini di Yunani, dan Reykjavik di Islandia menjadi beberapa destinasi yang ‘terpapar’ *overtourism*. Pada Mei 2016 pemerintah Thailand juga menutup secara sementara Pulau Koh Tachai, yang terkenal sebagai destinasi menyelam dan pantai yang indah, karena kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam akibat terlalu banyaknya wisatawan yang datang ke destinasi tersebut.

Overtourism sendiri menjadi cukup fenomenal setelah cukup banyak publikasi yang mulai menjadikan terminologi ini sebagai rujukan bagi destinasi yang terpapar pariwisata yang terlalu besar, sehingga menimbulkan permasalahan bagi destinasi dan masyarakat lokal (Capocchi, Vallone, Pierotti, & Amaduzzi, 2019; Innerhofer, 2018; Séraphin, Zaman, Olver, Bourliataux-Lajoinie, & Dosquet, 2019). Sebelumnya, hubungan “putus nyambung” antara host dan guest telah menjadi teori-teori fenomenal seperti Tourism Area Life Cycle (TALC) Butler dan Doxey Irritation Index.

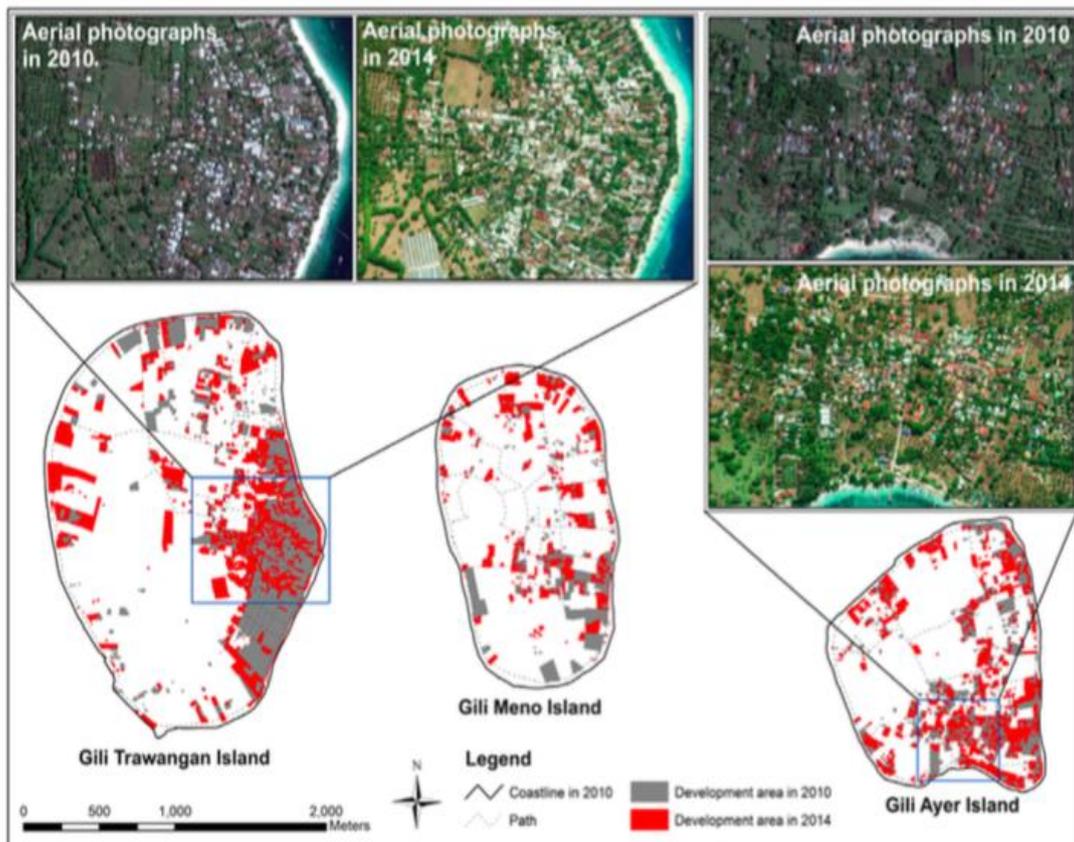
Overtourism merangkum narasi tentang persepsi negatif terhadap turis dan turisme di banyak tempat di Eropa. Amsterdam, Venezia, Dubrovnik, Barcelona, dan Islandia adalah beberapa nama yang sering muncul dalam bahasan (yang mengkritisi) pertumbuhan pariwisata yang berlebihan sehingga berdampak negatif bagi destinasi tersebut. Dampaknya adalah masyarakat lokal tidak lagi nyaman tinggal di destinasi tersebut. Penyebabnya bisa beragam—mulai dari ada kerumunan turis yang ‘mengambil alih’ jalan-jalan tempat mereka biasa bersepeda dan berjalan kaki, atau karena harga sewa rumah dan tanah melonjak naik akibat mekanisme bisnis pariwisata (Capocchi, et all, 2019; Séraphin, et all, 2019; Condé Nast Traveler, 2018; Innerhofer, 2018).

Selain itu, bagi sebuah negara dengan basis kepulauan terbesar di dunia, telah cukup banyak kritisi terhadap pengembangan destinasi kepulauan yang terlalu “Bali dan Jawa sentris”. Beberapa destinasi disinyalir berada pada ambang *overtourism* seperti Bali (CNTraveler, 2018), Labuan Bajo (Cole, 2017) dan Kepulauan Gili (Budilestari, et all, 2014; Hampton & Jeyacheya, 2015; Kurniawan, et all, 2016, 2019; Pitanatri, 2018).

Pariwisata sebagai sebuah industri merupakan sebuah sistem yang kompleks dan melibatkan banyak elemen. Mengelola

potensi pulau-pulau kecil di Indonesia yang demikian terisolir dan susah dijangkau menjadi semakin mendekati momentumnya. Pasalnya, selain memiliki nilai strategis, muncul kecenderungan perubahan titik episentrum ekonomi dunia, yang kini semakin bergeser dari kawasan petro-dollar di Timur Tengah ke kawasan Pasifik yang potensial. Pakar futurologi John Hay dalam Naisbitt dan Aburdene (1990) mengungkapkan, "Atlantik adalah samudra masa lampau, Mediterania (laut tengah) adalah samudra masa kini, dan Pasifik adalah samudra masa depan atau *ocean of the future*. Hal inilah yang kemudian menjadi peluang namun sekaligus tantangan bagi pengelolaan destinasi kepulauan di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, berikut komparasi foto Aerialkepulauan Gili pada tahun 2010, 2014 (diambil oleh Kurniawan et all) dan google Earth 2019 yang menunjukkan bagaimana kepadatan pembangunan di kepulauan ini. Padahal di tiga pulau ini terdapat pelarangan kendaraan bermotor dan seluruh bahan bangunan berasal dari pulau seberang. Hal ini relatif menyulitkan pembangunan bangunan, namun hal tersebut tidak menyurutkan pertumbuhan pembangunan akomodasi dan hotel di kawasan ini—dapat dibayangkan bagaimana dengan pertumbuhan kepadatan di pulau-pulau lain yang tidak memiliki pelarangan seperti di kepulauan Gili.



Gambar 2. Pertumbuhan Kepadatan Kepulauan Gili 2010, 2014 (atas) dan 2019 (bawah)
 Sumber: Kurniawan et al. 2016; Google Earth, 2019.

Padahal, United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 1988 telah mendeklarasikan pariwisata

berkelanjutan sebagai suatu upaya pengelolaan yang terarah atas seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga

kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat dipenuhi sambil mempertahankan integritas budaya, proses ekologi, keragaman biologi dan sistem yang mendukung kehidupan. Dalam pelaksanaannya, UNWTO UNWTO menilai begitu pentingnya menentukan Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*) sebagai elemen penting dari pariwisata bahari. Selain itu, budaya masyarakat lokal serta pentingnya kegiatan pariwisata bagi ekonomi lokal adalah juga unsur penting dan perlu dipertimbangkan setiap saat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Permasalahan overtourism jika tidak ditanggulangi akan menjadi bom bunuh diri bagi pariwisata Indonesia. Tawaran dari konsep *sustainable* dan *responsible tourism* dapat menjadi obat penawar menangani kesemrawutan akibat pariwisata; namun seperti yang telah didiskusikan di atas ini yang dibutuhkan adalah implementasi bukan sekedar konsep dan teori. Bagaimanapun juga kelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan ekonomi adalah faktor kunci yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan destinasi kepulauan di Indonesia.

Kebocoran Pariwisata akibat Indikator yang Salah?

Permasalahan kedua yang selanjutnya menjadi isu strategis pengembangan pariwisata adalah isu kebocoran pariwisata atau disebut sebagai *tourism leakage*. Isu ini merupakan implikasi langsung dari pertumbuhan pariwisata yang tidak berkelanjutan dimana aktivitas pariwisata tidak dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan pada akhirnya mengalami kemunduran atau stagnasi.

Dalam lingkup makro, salah satu penyebabnya adalah kinerja pariwisata diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang tidak tepat maka sebagai akibatnya pembangunan pariwisata menjadi masalah karena pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali. Sebagai contoh pertumbuhan pariwisata di suatu daerah atau

negara biasanya diukur dengan empat indikator utama yaitu: Jumlah kunjungan wisatawan, Nilai pengeluaran per wisatawan, Lama tinggal, Pendapatan pemerintah.

Jumlah kunjungan wisatawan (*numbers of tourist*), baik secara absolut maupun relatif terhadap jumlah penduduk, atau juga relatif terhadap pada periode sebelumnya.

Nilai pengeluaran per wisatawan (*tourist expenditure*). Angka ini sering digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kelas ekonomi wisatawan. Di saat yang sama pengeluaran per wisatawan ini menggambarkan daya saing suatu daerah terhadap daerah lain. Semakin besar pengeluaran atau belanja wisatawan untuk jenis jasa dan produk yang sama di suatu daerah dapat menggambarkan kurangnya daya saing daerah tersebut. Nilai pengeluaran per wisatawan juga merupakan potensi penerimaan atau pendapatan daerah tujuan wisata.

Lama tinggal di suatu daerah (*length of stay*). Indikator ini biasanya diukur dalam satuan hari. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah merupakan proksi dari daya tarik daerah tersebut. Lama tinggal suatu daerah berkorelasi positif dengan jumlah pengeluaran pariwisata.

Pendapatan pemerintah pada tingkat nasional maupun daerah (*Gross National Product* dan *Gross Domestic Product*). Indikator ini adalah hasil perkalian dari tiga indikator sebelumnya. Poin ini sering dipakai sebagai indikator makro pertumbuhan pariwisata.

Pertanyaannya kemudian, apakah keempat indikator ini sudah cukup untuk menggambarkan pariwisata berkelanjutan? Bila yang dievaluasi adalah pertumbuhan pariwisata maka keempat indikator sudah sangat tepat sebagai alat ukur. Namun demikian, keempat indikator ini hanya mengukur pertumbuhan pariwisata. Secara konvensional, keempat indikator ini memang selalu digunakan untuk mengukur perkembangan atau keragaan pariwisata pada umumnya. Sesungguhnya keempat indikator ini belum cukup untuk

mengukur atau mengevaluasi kinerja pariwisata berkelanjutan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Carbone (2005), keberlanjutan ekonomi misalnya, harus mengacu pada pendapatan tambahan yang diberikan kepada penduduk setempat untuk mengkompensasi mereka atas beban yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran wisatawan. Selain itu, keberlanjutan ekonomi dari pertumbuhan pariwisata dapat disebut sebagai peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal yang dapat dihasilkan oleh pengembangan pariwisata dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan semua dampak beragam yang mempengaruhi berbagai sektor dan industri.

Namun demikian, keberlanjutan pengembangan pariwisata secara umum, dan khususnya keberlanjutan ekonomi dari pertumbuhan pariwisata, harus diukur agar bermanfaat (Garrigós et al, 2004), dan meskipun pertanyaan dan tantangannya adalah apakah ini mungkin dilakukan? (Buckley, 1999). Garrigós et al (2004) menyatakan bahwa pengukuran keberlanjutan seharusnya mengukur berbagai faktor berpengaruh sehingga dapat meningkatkan perencanaan dan proses manajerial, serta mampu meningkatkan level keberlanjutan suatu wilayah (Cooper et al, 1998). Jika berbicara keberlanjutan maka pengukuran yang tepat menjadi sangat penting dalam industri pariwisata, apalagi di destinasi dan Negara yang menjadikan pertumbuhan dan indikator-indikator ekonomis sebagai capaian pembangunan sector ini.

Whether the benefits of tourism as an economic base are equivalent to those of other sectors depends on the degree of linkage within or leakage from the regional economy (Haddad et al, 2013)

Sebagaimana yang disebutkan oleh Haddad et al (2013) pariwisata 'layak' diukur dalam basis ekonomi jika manfaatnya juga perhitungannya juga mempertimbangkan kebocoran yang muncul. Masalah utama dari keberlanjutan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah meskipun pendapatan yang

dihasilkan oleh pariwisata melimpah tetapi seringkali bocor keluar dari wilayah tersebut karena impor, atau kepemilikan asing atas fasilitas wisata di destinasi tersebut (Budeanu, 2007). Oleh karena itu, menurut Sheng dan Tsui (2009), pendapatan bersih pariwisata sebenarnya adalah jumlah pengeluaran wisatawan yang tinggal di destinasi setelah dikurangi keuntungan dan upah dibayarkan di luar daerah dan setelah impor dibeli. Jumlah yang harus dikurangi inilah disebut sebagai "kebocoran"

The real tourism revenue is the amount of tourist spending that remains locally after profits and wages are paid outside the area and after imports are purchased. The amounts to be subtracted are called leakage (Sheng and Tsui, 2009)

Kebocoran dapat didefinisikan sebagai 'kegagalan pengeluaran wisatawan untuk tetap berada dalam ekonomi tujuan' (Sandbrook, 2010, hal 125), atau 'hilangnya valuta asing dan biaya tersembunyi lainnya yang berasal dari kegiatan terkait pariwisata' (Cernat dan Gourdon, 2005). Semakin tinggi kebocoran sebuah destinasi, maka akan semakin rendah dampak ekonomi pariwisata; dimana manfaat dari sector ini tidak "tinggal" di destinasi. Sebagai contoh, di beberapa daerah, penduduk lokal tidak memperoleh manfaat yang cukup dari pengembangan pariwisata ketika manajer hotel lebih suka mempekerjakan pekerja asing daripada pekerja lokal (Hohl dan Tisdell, 1995). Hal yang sama juga terjadi jika operator brand hotel internasional beroperasi di destinasi tersebut, maka dapat dipastikan porsi yang cukup besar akan kembali ke negara asal operator tersebut beroperasi.

Selain itu, kadang-kadang hanya sebagian kecil dari nilai produktif sektor pariwisata tetap ada di daerah setempat, dan banyak pengeluaran wisatawan kembali ke daerah asal (misalnya, ketika turis membeli produk impor, atau ada sedikit pajak) atau tidak pernah meninggalkan negara asal (Lejarraga dan Walkenhorst, 2010). Misalnya

kecenderungan wisatawan Jepang yang mempergunakan agen perjalanan, operator tur, maskapai penerbangan bahkan hotel asal Jepang. Dalam istilah akademis, kondisi ini lazim disebut sebagai “*tourist bubble*” (Pitana & Gayatri 2005). Seperti misalnya yang terjadi di beberapa destinasi di Bali, yang seringkali terlalu mengakomodir *tourist bubble* sehingga yang banyak berkembang justru restoran-restoran Jepang, Italia atau Prancis—yang tentu membutuhkan impor bahan dan tenaga kerja (Pitanatri, 2016).

Ada yang disebut sebagai kebocoran *import* dan kebocoran *eksport* dan kebocoran yang sifatnya tidak terlihat atau *invisible leakage*. Biasanya kebocoran *import* terjadi ketika terjadinya permintaan terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman *import* yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Sedangkan kebocoran *eksport* seringkali terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Kondisi seperti ini, akan mengundang masuknya penanaman modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya, keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan kebocoran *eksport*

Ada banyak faktor yang menyebabkan peningkatan kebocoran suatu daerah. Faktor-faktor ini sesuai dengan beberapa situasi seperti perencanaan liburan, transportasi dan akomodasi (Supradist, 2004). Salah satu situasi ini adalah ketika perusahaan asing mencoba menjual kepada wisatawan semua paket inklusif untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebocoran seperti tenaga kerja, infrastruktur, teknologi,

dan barang dan jasa yang diimpor (Thomas et al, 2005).

Economic leakage ini dianggap paling sulit untuk mengatasinya karena sangat sulit untuk mengukur secara pasti. Permasalahan ini juga ditambah dengan kondisi pembangunan pariwisata paling memungkinkan terbukanya proses liberalisasi sehingga kemungkinan terjadinya *economic leakage* pada setiap aktivitas perekonomian yang terjadi menjadi sangat besar. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah hal tersebut memang dimungkinkan, tetapi jika hal tersebut memang terjadi, apakah industri pariwisata Indonesia akan mampu menguasai pasar?

Jika dilihat dari aspek tingkat leakage (kebocoran devisa), sejumlah pendapat mengatakan bahwa pariwisata Indonesia menciptakan leakage antara 50% hingga 80%. Jika data tersebut akurat, maka leakage yang terjadi di Indonesia tergolong cukup besar. Sebagai komparasi sembilan negara di kepulauan Karibia memiliki import rate pada kisaran 45% hingga 90% sehingga pada kondisi ini, economic leakages terjadi pada persentase yang sangat tinggi (Ramjee Singh 2008). Hasil penelitian yang berbeda di New Zealand dan Philippines menunjukkan *economic leakages* terjadi sangat rendah yaitu kisaran 11 hingga 20% hal ini disebabkan kebutuhan komponen import relative rendah.

Destinasi kepulauan memiliki potensi *leakage* yang sangat besar karena memiliki ketergantungan import yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Selain itu destinasi kepulauan juga relatif memiliki keterbatasan Infrastruktur sehingga justru membuka masuknya perusahaan asing ke dalam negeri (Karagiannis, 2003). Dan akhirnya sumberdaya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian tidak efisien bahkan justru berbiaya tinggi sehingga import dianggap menjadi alternatif yang lebih baik.

Alternatif Solusi

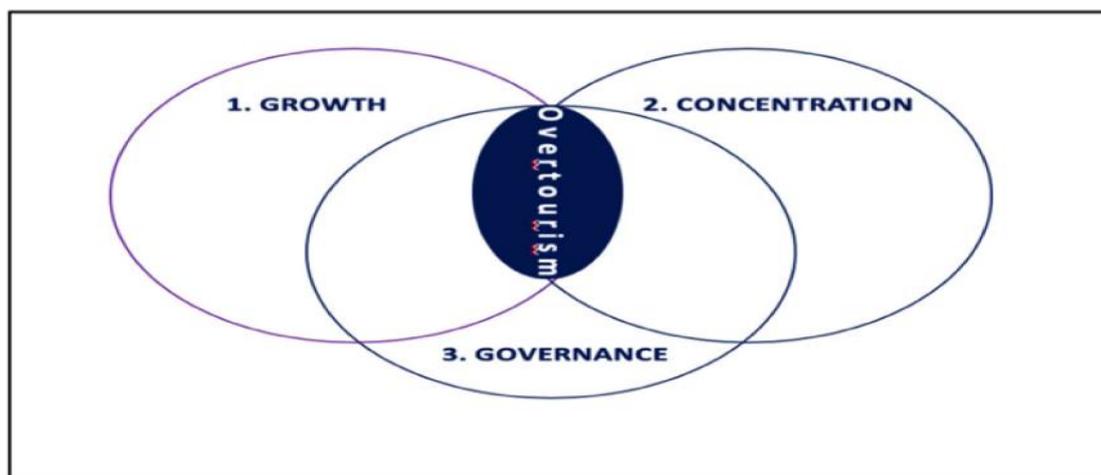
Apa yang kemudian menjadi permasalahan di banyak destinasi sebenarnya adalah adanya ego sektoral dalam pengembangan pariwisata. Penta helix (Akademisi-Bisni-Government-Community dan Media) juga seringkali tidak berjalan dengan sinergis. Sebagai contoh, hasil penelitian dari akademisi yang sering menjadi menara gading sehingga sulit diakses dan dilaksanakan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Selain itu, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan pariwisata adalah tidak terjadinya simbiosis antara pengembangan pariwisata di destinasi dengan masyarakat lokal. Pariwisata yang diharapkan sebagai katalis pembangunan, malah berbalik menimbulkan konflik antara wisatawan, masyarakat lokal, dan investor; yang kini juga berpotensi terpapar *overtourism* dan potensi *leakage* yang besar. Alhasil, berbagai permasalahan ekonomi-social-budaya seringkali dikaitkan sebagai imbas dari perkembangan sector pariwisata di destinasi tertentu.

Penerapan ambang batas daya dukung pariwisata sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Peraturan ini menjelaskan strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi wilayah yang sudah melampaui ambang batas dengan menyusun regulasi perijinan demi menjaga daya dukung lingkungan. Hanya saja implementasi kebijakan ini belum banyak diterapkan di daerah-daerah wisata. Pembangunan pariwisata jangka pendek yang hanya mementingkan jumlah wisatawan bisa dikatakan hanya target politik belaka. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebaiknya melakukan investasi melalui pembelajaran dan pendampingan, dan menyiapkan agar masyarakat di daerah tujuan wisata mampu masuk dan bertahan di industri ini. Yang terpenting adalah bagaimana melihat pariwisata dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam.

Solusi aplikatif yang ditawarkan adalah kembali ke fitrah awal, menciptakan ekosistem yang harmonis antara *host and guest*. Dalam kaitannya dengan potensi *overtourism* Capocchi et al., (2019) menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga alasan mengapa terjadi *overtourism* di suatu destinasi yaitu ketidakseimbangan antara *growth*, *concentration* dan *governance* sebagaimana yang tampak pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 3. Faktor Pencetus Overtourism
Sumber: Capocchi et al (2019)

Concentration dapat diurai dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya Mobile Data Positioning (MDP) yang melihat pola pergerakan wisatawan secara real time. Mengetahui pola pergerakan wisatawan akan memberi kesempatan bagi destinasi untuk melihat pola dan “memecah konsentrasi” dengan penciptaan produk yang sesuai dengan pola pergerakan tersebut. Regulasi kemudian haruslah mengikuti apa yang menjadi temuan dari penelitian-penelitian berbasis MDP. Selain itu MDP memberi kesempatan bagi system kepariwisataan destinasi kepulauan di Indonesia untuk mengurai benang kusut sehingga terjadi keimbangan antara *tourist generating areas* dengan *tourist receiving detinations*.

MDP juga dapat disandingkan dengan program Sustainable Tourism for Development (STDev) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Kriteria GSTC berfungsi sebagai standar dasar global untuk keberlanjutan dalam pariwisata. Kriteria digunakan untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran, pembuatan kebijakan untuk bisnis dan lembaga pemerintah dan jenis organisasi lainnya, pengukuran dan evaluasi, dan sebagai dasar untuk sertifikasi.

SIMPULAN

Penerapan pariwisata berkelanjutan seharusnya menyesuaikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh destinasi. Masyarakat lokal sangat didorong untuk ambil bagian dalam pengelolaan pariwisata sekitar tempat tinggal mereka terutama masyarakat di pedesaan, tujuannya untuk mencegah masyarakat menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh investasi pemodal besar. Masyarakat harus menjadi konseptor yang mengambil peran atas pengelolaan fasilitas utama (contoh: situs wisata) maupun pendukung (contoh: hotel, restoran) di lingkungan mereka

tinggal. Pelibatan ini jangan hanya dimaknai menjadi perekrutan masyarakat lokal yang kemudian sekadar dipekerjakan sebagai pegawai rendah pada perusahaan yang dimiliki investor besar diluar masyarakat lokal.

Pengembangan pariwisata di masa mendatang juga sangat perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Dunia sudah semakin ‘sakit-sakitan’ akibat peradaban manusia kini yang selalu menghasilkan eksek destruktif. Adanya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata tentu membuat langkah ini lebih mudah. Masyarakat lokal lebih memperhatikan aksi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengawal kelestarian lingkungan menjadi lebih mudah apabila sedari awal telah dibuat peta jalan konservasi alam, pengolahan limbah, dan perihal lain yang seringkali tidak sejalan dengan industri pariwisata. Perencanaan perlindungan lingkungan menjadi lebih mudah bila dimulai sebelum gelombang kedatangan arus wisatawan yang semakin besar.

Pariwisata berkelanjutan berpijak pada pembangunan sektor pariwisata yang meningkatkan pendapatan ekonomi yang melibatkan aspek sosial terutama masyarakat lokal sekitar destinasi wisata dan tentunya bersahabat dengan lingkungan hidup. Perlu diingatkan kembali pariwisata berkelanjutan yang dengan pijakan yang adiluhung diatas tentu harus membawa pengalaman lebih baik bagi wisatawan yang berkunjung, karena hakikat manusia berwisata adalah untuk mendapat kesenangan.

Rekomendasi ini didasarkan atas pemahaman bahwa index kebahagiaan masyarakat lokal akan berkontribusi positif terhadap pengalaman wisatawan saat mengunjungi destinasi tersebut (Croes, Ridderstaat, & van Niekerk, 2018; Croes, Rivera, Semrad, & Khalizadeh, 2017). Oleh sebab itu penelitian-penelitian solusi *overtourism* dan *tourism leakage* haruslah menjadi *top-notch priority* bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Selain itu,

dukungan politis serta komitmen dari pemerintah pusat sampai daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan, sehingga pariwisata sebagaimana yang dicita-citakan— dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan serta penghapusan kemiskinan.

REFERENSI

- Adams, P.D., and Parmenter, B.R. (1995), 'An applied general equilibrium analysis of the economic effects of tourism in a quite small, quite open economy', *Applied Economics*, Vol 27, pp 985–994.
- Blackstock, K.L., White, V., McCrum, G., Scott, A., Hunter, C., (2008). Measuring re- sponsibility: an appraisal of a Scottish National Park's sustainable tourism indicators. *J. Sustain. Tour.* 16 (3), 276-297.
- Blake, A., and Sinclair, M.T. (2003), 'Tourism crisis management US response to September 11. *Annals of Tourism Research*, Vol 30, No 4, pp 813–832.
- Blake, A., Arbache, J.S., Sinclair, M.T., and Teles, V. (2008), 'Tourism and poverty relief'. *Annals of Tourism Research*, Vol 35, No 1, pp 107–126.
- Bohdanowicz, P., Simanic, B., Martinac, I.V.O., (2005). Environmental training and measures at scandic hotels, Sweden. *Tour. Rev. Int.* 9 (1), 7-19.
- Bramwell, B., Lane, B., (1993). Sustainable tourism: an evolving global approach. *J. Sustain. Tour.* 1 (1), 1-5
- Bramwell, B., Lane, B., McCabe, S., Mosedale, J., Scarles, C., (2008). Research per- spectives on responsible tourism. *J. Sustain. Tour.* 16 (3), 253-
- 257
- Budilstari, N., Hutomo, M., & Ardiwidjaja, R. (2014). Permasalahan Lingkungan Di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 9(1), 91-107.
- Budeanu, A., (2005). Impacts and responsibilities for sustainable tourism: a tour operator's perspective. *J. Clean. Prod.* 13 (2), 89-97.
- Butler, R. (1999). Sustainable tourism: a state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, Vol 1, pp 7– 25.
- Butler, R., (1995). Introduction. In: Butler, R., Pearce, D. (Eds.), *Change in Tourism: People, Places and Processes*. Routledge, New York, pp. 1-11.
- Capocchi, Vallone, Pierotti, & Amaduzzi. (2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. *Sustainability*, 11(12), 3303. <https://doi.org/10.3390/su11123303>
- Carbone, M. (2005), 'Sustainable tourism in developing countries: poverty alleviation, participatory planning, and ethical issues', *European Journal of Development Research*, Vol 17, No 3, pp 559–565.
- Cawley, M., and Gillmor, D.A. (2007), 'Integrated rural tourism: concepts and practice', *Annals of Tourism Research*, Vol 35, No 2, pp 316–337.
- Chettiparamb, A., & Kokkranikal, J. (2012). Responsible tourism and sustainability: the case of Kumarakom in Kerala, India. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 4(3), 302-326.

- Cernat, L., and Gourdon, J. (2005), 'Is the concept of sustainable tourism sustainable?', Developing the Sustainable Tourism Benchmarking Tool, MPRA Paper No 4178 (<http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4178/>, accessed 20 October 2019).
- Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 67, 14-24.
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Shepherd, R., and Wanhill, S. (1998), *Tourism Principles and Practice*, 2nd edn, Longman, Harlow.
- CNTraveler. (2018). 15 Beloved Places Struggling With Overtourism. Retrieved October 2, 2019, from <https://www.cntraveler.com/galleries/2015-06-19/barcelona-bhutan-places-that-limit-tourist-numbers>
- Dasmann, R.F., Freeman, P.H., Milton, J.P., (1973). *Ecological Principles for Economic Development*. John Wiley & Sons, Washington.
- Dwyer, L., Forsyth, P., Madden, J., and Spurr, R. (2000), 'Economic impacts of inbound tourism under different assumptions regarding the macroeconomy', *Current Issues in Tourism*, Vol 3, No 4, pp 325–363.
- Dwyer, L., Forsyth, P., and Spurr, R. (2006), 'Assessing the economic impacts of events: a computable general equilibrium approach', *Journal of Travel Research*, Vol 45, No 1, pp 59–66.
- Fennell, D.A., (2006). *Tourism Ethics*. Channel View, Clevedon.
- Fennell, D., Malloy, D., 2007. *Codes of Ethics in Tourism. Practice, Theory, Synthesis*. Channel View Publications, Clevedon.
- Garrigós Simon, F., Narangajavana, Y., and Marques, D. (2004), 'Carrying capacity in the tourism industry: a case study of Hengistbury Head', *Tourism Management*, Vol 25, No 2, pp 275–283.
- Goodwin, H., (2011). *Taking Responsibility for Tourism*. Goodfellow Publishers Limited, Oxford.
- Haddad, E.A., Porsse, A.A., and Rabahy, W. (2013), 'Domestic tourism and regional inequality in Brazil', *Tourism Economics*, Vol 19, No 1, pp 173–186.
- Hall, M., (2012). *Governance and responsible tourism*. In: Leslie, D. (Ed.), *Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice*. CABI, Wallingford, pp. 107-118.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2013). Bio-rock and roll? Dive tourism and island communities: the case of Gili Trawangan, Indonesia.
- Hohl, A.E., and Tisdell, C.A. (1995), 'Peripheral tourism: development and management', *Annals of Tourism Research*, Vol 22, No 3, pp 517–534.
- Hughes, H.L. (1994), 'Tourism multiplier studies: a more judicious approach', *Tourism Management*, Vol 15, No 6, pp 403–406.
- Higgins-Desbiolles, F., 2010. The elusiveness of sustainability in tourism: the culture-ideology of consumerism and its implications. *Tour. Hosp. Res.* 10 (2), 116-115.
- Lejarraga, I., and Walkenhorst, P. (2010), 'On linkages and leakages: measuring the secondary effects of tourism',

- Applied Economics Letters*, Vol 17, pp 417–421.
- Karagiannis, N. (2003). Tourism, linkages, and economic development in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 15(3), 184-187.
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Patterns of landscape change on small islands: A case of Gili Matra Islands, Marine Tourism Park, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 553-559.
- Kusworo, H. A. (2015). Framing poverty: an institutional entrepreneurship approach to poverty alleviation through tourism. University of Groningen.
- Leslie, D., (2012a). *Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice*. CABI, Wallingford
- Leslie, D., (2012b). *Introduction. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice*. CABI, Wallington, pp. 1e16.
- Leslie, D., (2012c). *The responsible tourism debate. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice*. CABI, Wallingford, pp. 17e42. Mc Guban, S., 2002. Asynchronous computer mediated conferencing to
- Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse—Towards ‘responsustainable’ tourism. *Journal of Cleaner Production*, 111, 461-470.
- Mihali , T., Žabkar, V., & Cvelbar, L. K. (2012). A hotel sustainability business model: evidence from Slovenia. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(5), 701-719.
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata: Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Andi.
- Pitanatri, P.D. S. (2018). Learn to Earn: Assessing Economic Impact of Community Based Tourism in Gili Trawangan, Indonesia. *International Journal Of Multidisciplinary Educational Research*, 7 (1). Pp 220-236
- Pitanatri, P. D. S., & Putra, I. N. D. (2016). Wisata kuliner: atribut baru destinasi Ubud. JagatPress bekerja sama dengan Program Studi Magister Kajian Pariwisata, Universitas Udayana.
- Pratt, S., and Blake, A. (2009), ‘The economic impact of Hawaii’s cruise industry’, *Tourism Analysis*, Vol 14, No 3, pp 337–352.
- Republika (2017). Prestasi Pariwisata Sumbang Suksesi Pembangunan Nasional. Retrieved October 14, 2019, from <https://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/pesona-indonesia/ov14x5280/prestasi-pariwisata-sumbang-suksesi-pembangunan-nasional>
- Ritchie, J.R.B., Crouch, G.I., 2000. The competitive destination: a sustainable perspective. *Tour. Manag.* 21 (1), 1-7.
- RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)
- RTP, (2002). Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Responsible Tourism Partnership. Retrieved

- October 14, 2019 from: <http://www.responsibletourismpartnership.org/RTWorld.html>.
- Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. *Annals of Tourism Research*, 33(4), 1121–1140.
- Sandbrook, C.G. (2010), 'Putting leakage in its place: the significance of retained tourism revenue in the local context in rural Uganda', *Journal of International Development*, Vol 22, No 1, pp 124–136.
- S raphin, H., Zaman, M., Olver, S., Bourliataux-Lajoine, S., & Dosquet, F. (2019). Destination branding and overtourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 38 (November 2018), 1–4.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.11.003>
- Sheng, L., and Tsui, Y. (2009), 'Taxing tourism: enhancing or reducing welfare?', *Journal of Sustainable Tourism*, Vol 17, No 5, pp 627–635.
- SindoNews. (2018). Kontribusi Pertumbuhan Pariwisata di Sektor Ekonomi Terbesar... Retrieved October 14, 2019, from <https://ekbis.sindonews.com/read/1231216/34/kontribusi-pertumbuhan-pariwisata-di-sektor-ekonomi-terbesar-dan-tercepat-1502940648>
- Singh, D. R. (2008). Small Island Developing States (SIDS): tourism and economic development. *Tourism Analysis*, 13(5-6), 629-636.
- Stanford, D., (2008). Exceptional visitors: dimensions of tourist responsibility in the context of New Zealand. *J. Sustain. Tour.* 16 (3), 258-275
- Supradist, N. (2004). 'Economic leakage in tourism sector', IIIIEE master's theses (<http://luplub.lu.se/luur/download?func=downloadFileandrecordOid=1329250andfileOid=132925>, accessed 21 October 2019).
- Swarbrooke, J., 1999. *Sustainable Tourism Management*. CABI, Wallingford.
- Thomas, R.N., Pigozzi, B.W. and Sambrook, R.A. (2005), 'Tourist carrying capacity measures: crowding syndrome in the Caribbean', *The Professional Geographer*, Vol 57, pp 13–20.
- United Nation World Tourism Organization. (2011). *Sustainable Development and Tourism Program*. Brochure. 2 p.
- United Nation Environmental Programme. (2009). *Sustainable Coastal Tourism. An Integrated Planning and Management Approach*. Nairobi, Kenya, 164p.
- United Nations Environment Programme dan United Nation World Tourism Organization (2005). Making Tourism More Sustainable. Paris: United Nations Environment Programme. World Tourism Organization, Madrid. UNWTO,
- United Nations Environment Programme. (2010). Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management. Hertwich, E., van der Voet, E., Suh, S., Tukker, A., Huijbregts M., Kazmierczyk, P., Lenzen, M., McNeely, J., Moriguchi, Y.
- WCED, 1987. *Our Common Future*. Oxford University Press, Oxford.

Van Marrewijk, M., 2003. Concepts and definitions of CSR and corporate sustain- ability: between agency and communion. *J. Bus. Ethics*, 44 (23), 95-105.

Zhou, D., Yanagida, J.F., Chakravorty, U., and Leung, P. (1997), 'Estimating economic impacts from tourism', *Annals of Tourism Research*, Vol 24, No 1, pp 76–89.

BIODATA PENULIS

Putu Diah Sastri Pitanatri, adalah dosen Politeknik Pariwisata Bali Bali yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral pada kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Selain aktif dalam berbagai asosiasi nasional dan internasional, Diah telah menulis beberapa buku diantaranya Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan (2018, eds bersama I Wayan Mertha), dan bersama I Nyoman Darma Putra menulis buku Wisata Kuliner Atribut Baru Destinasi Ubud (2016). Penghargaan yang pernah diterima antara lain dosen terbaik di Kementerian Pariwisata dalam Win Way Award (2018) dan best paper presenter dalam 1st International Conference OBOROT-Palembang (2018)

Id Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=9GHeVtkAAAAJ&hl=en>